

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arrowsmith S dan Linarelli J, 2000, *Regulating Public Procurement: National and International Perspectives*, KLI: The Hague, London
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, PT Nusa Media, Bandung
- Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Rosyda Karya, Bandung
- Marbun, S.F. 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Moh Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, PT Ghalia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administarasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Admministrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Ghalia Utama Indonesia, Jakarta.
- Samsul Ramli, 2014, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, PT Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 1993, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syaifuddin Azwar, 2015, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wayne R Lafave, 2003, *Principles Of Criminal Law*, West Thompson Reuters Business, New York

2. Jurnal

- Abu Sofian, 2014, *Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal BPPK, Vol 7, No, 1, Desember.
- Aminuddin, 2012, *Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi*, Jurnal Media Hukum, Vol 19, No 1, Juni.
- Andrea Patrucco dkk, 2017, *Research Perspectives on Public Procurement: Content Anaysis Of 14 Years Of Publications in the Journal Public Procurement*, *Journal of Public Procurement*, Vol. 17, Issue. 2, Maret.
- Ivan Fauzani Raharja, 2014, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif, Vol 8, No 2, Mei.
- Richo Andi Wibowo, 2015, *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?)*, Jurnal Integritas, Vol 1, No 1, November.
- Richo Andi Wibowo, 2017, *Strengthening the Effectiveness of Ecclusion Mechanisme in Public Procurement: A Comparative Legal Study Between Indonesia and The Netherlands*, *Global Public Procurement Theories and Practies*.
- Sri Nur Hari Susanto, 2019, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 1, Maret.
- Sudjana, 2019, *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020*, *Al-Amwal*, Vol. 2, No. 1, Agustus.

3. Hasil Penelitian

-

4. Internet

- Admin, 2018, *10 Poin Penting Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010*, <https://www.pengadaan.web.id/2018/03/10-poin-penting-perbedaan-perpres-no-16-tahun-2018-dengan-perpres-no-54-tahun-2010.html>, diakses 09 September 2020.
- Admin, *Baru Berusia Satu Bulan, Proyek Ditingkatkan, Struktur Jalan Provinsi Simpang Kota Pinang Sudah Rusak*, <https://hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/Baru-Berusia-Satu-Bulan--Proyek-Ditingkatkan--Struktur-Jalan-Provinsi-Simpang-Kota-Pinang-Sudah-Rusak>, diakses 10 Oktober 2020.
- Admin, *Jalan Provinsi Penghubung Siantar-Perdagangan bak Kubangan Kerbau Kata Anggota DPRD Sumut*, <https://medan.tribunnews.com/2020/08/25/jalan-provinsi-penghubung>

[siantar-perdagangan-bak-kubangan-kerbau-ini-kata-anggota-dprd-sumut](#), diakses 12 Oktober 2020.

Admin, 2020, *Disorot Megawati, Ini 13 Kepala Daerah Sumut yang Terjerat Korupsi*, <https://news.detik.com/berita/d-5128474/disorot-megawati-ini-13-kepala-daerah-di-sumut-yang-terjerat-korupsi>, diakses 17 Oktober 2020.

Admin, *Kriminalisasi PBJ Menjadi Momok Bagi Pejabat Daerah*, <http://infopublik.id/kategori/nusantara/312180/kriminalisasi-pbj-menjadi-momok-menakutkan-bagi-pejabat-daerah>, diakses 19 Oktober 2020.

Admin, *Penyerapan Anggaran Pemprovsumu Masih Rendah*, <https://harianandalas.com/medan-kita/penyerapan-anggaran-pemprovsumu-masih-rendah>, diakses 19 Oktober 2020.

Admin, *Muncul Daftar Hitam, BPTD Sumut sudah Taati Peraturan Sesuai Dengan Porsinya*, <https://potretindonesianews.com/munculnya-daftar-hitam-bptd-sumut-sudah-taati-peraturan-sesuai-dengan-porsinya/>, diakses 20 Oktober 2020.

Admin, <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/08/tender-cepat.html>, diakses 21 Oktober 2020.

Benny Pasaribu, *Kontraktor Sumut Cuma Minta Jangan Dikriminalisasi*, <https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/11/10/197459/kontraktor-sumut-cuma-minta-jangan-dikriminalisasi/>, diakses 19 Oktober 2020.

Benny Pasaribu, *Jelang Akhir 2019 Serapan Anggaran Pemprov Sumut Masih 54 persen*, https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/10/14/89409/jelang_akhir_2019_serapan_anggaran_pemprov_sumut_masih_54/, diakses 19 Oktober 2020.

Helppy, *Duh! Dinas PU Provinsi Sumut Diduga Tidak Becus Dalam Perhitungan HPS di Kepni*, <http://www.investigasindo.com/2017/06/duh-dinas-pu-provinsi-sumut-diduga.html?m=1#comment-form>, diakses 20 Oktober 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses 09 September 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Wilayah*, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>, diakses 10 September 2020.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, <https://lpse.sumutprov.go.id/eproc4/lelang#>, diakses 19 September 2020

Mei Leandha, *Selama Agustus, 10 Kontraktor dihukum karena persekongkolan tender proyek*, <https://medan.kompas.com/read/2019/09/13/16512481/selama-agustus-10-kontraktor-dihukum-karena-persekongkolan-tender-proyek?page=all>, diakses 17 Oktober 2020.

Natalin Sinaga, *Sumut Daerah Persekongkolan Tender Tertinggi KPPU Tantang Calon Kepala Daerah Menolaknya*, <https://www.medan.tribunnews.com/amp/2020/09/08/sumut-daerah->

[persekongkolan-tender-tertinggi-kppu-tantang-calon-kepala-daerah-menolaknya](#), diakses 10 September 2020.

Toni Hutagalung, 2018, *Proyek Drainase Rp 18M Dinas Binamarga Sumut diduga Penyebab Banjir*, <https://orbitdigitaldaily.com/proyek-drainase-rp18m-dinas-binamarga-sumut-diduga-penyebab-banjir/>, diakses 10 Oktober 2020.

Tri Wahyu Rubianto, <https://catatanrubianto.com/2018/09/21/antara-pengadaan-langsung-dan-konsolidasi-dalam-pengadaan-barang-jasa/>, diakses 21 Oktober 2020

Yudhia Perdana Sikumbang, *Paranoid Tipikor Pelaku Kontrak Pengadaan Pemerintah*, <https://gagasanriau.com/mobile/detailberita/40509/paranoid-tipikor-pelaku-kontrak-pengadaan-pemerintah>, diakses 19 Oktober 2020.

Tranparency International, <https://riset.ti.or.id/cpi2018/>, diakses 17 Oktober 2020.

5. Makalah

-

6. Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Commission on International Trade Law on Public Procurement

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 11).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 32)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 33).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 770).